

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

(Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti)

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi
Pascasarjana Universitas Islam Riau**



Oleh :

NAMA : GILANG WANA WIJAYA CENDICKIA
NOMOR MAHASISWA : 17 7122 062
BIDANG KAJIAN UTAMA : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
(Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Meranti)

ABSTRAK

OLEH : GILANG WANA WIJAYA CENDICKIA

Pengembangan pasar tidak terlepas dari upaya kebijakan dalam penanganannya dengan melakukan pengelolaan, penataan dan pembangunan serta pengawasan kegiatan pasar, namun hal ini masih jauh dari maksimal sehingga pengembangan pasar masih belum terlaksana sesuai dengan pengembangan pasar. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Kecamatan Tebing Tinggi tidak terlepas dari upaya pencapaian kebijakan meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan guna pencapaian keberhasilan pengembangan pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, Kuesioner, wawancara dan Dokumentasi. Pembahasan Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti belum maksimal dimana penataan penyediaan lokasi los, kios belum tepat sasaran dikarenakan jauh dari lokasi masyarakat berbelanja. Hasil penelitian bahwa Revitalisasi Pasar Modren di Kecamatan Tebing Tinggi belum sesuai dengan lokasi yang diinginkan masyarakat sehingga banyak pedagang yang berjualan di lokasi lain dikarenakan jauh dari jangkauan pengunjung, dan belum adanya penertiban dan sanksi tegas oleh petugas pasar terhadap pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya. Kesimpulan bahwa Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren belum maksimal dilaksanakan dikarenakan penempatan pasar yang masih belum tepat sasaran, pengawasan petugas pasar belum berlangsung disetiap kegiatan pasar, pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan para pedagang serta penyediaan penampungan sampah yang masih kurang dan peyediaan lokasi parkir kendaraan . Saran peneliti yaitu sebaiknya penempatan los, kios ditempatkan sesuai dengan alur masuk pembeli, petugas melakukan pengawasan kegiatan pada di setiap kegiatan pasar, menambah jumlah petugas pasar dan pembenahan tempat penampungan sampah, lokasi parkir sehingga kegiatas pasar dapat berlangsung dengan baik.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pasar

PUBLIC POLICY EVALUATION
*(Evaluation Study on Modern Market Revitalization Activities at the SME
Department of Industry and Trade Meranti Islands Regency)*

ABSTRACT

BY : GILANG WANA WIJAYA CENDICKIA

Market development is inseparable from policy efforts in handling by managing, organizing and developing and supervising market activities, However, this is still far from the maximum so that market development has not been carried out in accordance with market developments. The Department of Industry and Trade of Meranti Islands Regency SMEs in the Modern Market Revitalization Activities in Tebing Tinggi District cannot be separated from efforts to achieve policies that include Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Evenness, Responsiveness and Accuracy in order to achieve successful market development. The research method used is a quantitative method with data collection techniques through observation, questionnaires, interviews and documentation. Discussion of the Modern Market Revitalization Activity Program by the Meranti Islands Regency Trade and Industry Office has not been maximized where the arrangement of providing kiosk locations, kiosks is not right on target because it is far from shopping centers. The results showed that the Modern Market Revitalization in Tebing Tinggi District was not in accordance with the location desired by the community so that many traders sold in other locations because they were far from the reach of visitors, and there was no strict supervision and sanctions. By market officials against traders who sell unfairly. Conclusion The Modern Market Revitalization Program has not been maximally implemented due to inadequate market placement, supervision of market officers has not been carried out in every market activity, sanctions for violations committed by traders and the provision of waste collection points and inadequate vehicle parking. location. Researchers suggest that it is better to place booths, kiosks are placed according to the buyer's entry flow, officers oversee activities at each market activity, increase the number of market officers and increase garbage collection sites, parking locations so that market activities can take place properly.

Keywords: *Evaluation, Policy, Market*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk tesis dapat penulis selesaikan. “Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab per bab tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salutation dan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia., M.Si. selaku ketua Program studi dan jajaran Dosen pada jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam menyusun tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung
5. Ibu Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
8. Orang tua selaku yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 terutama jurusan Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Publik, serta rekan-rekan yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya yang tidak dapat saya cantumkan disini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 30 Juli 2021
Ttd,

Gilang Wana Wijaya Cendickia

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	14
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN	
2.1 Studi Kepustakaan	16
2.1.1 Konsep dan Teori Administrasi Publik	16
2.1.2 Konsep dan Teori Organisasi Publik.....	19
2.1.3 Konsep dan Teori Manajemen Publik	21
2.1.4 Konsep dan Teori Manajemen Strategik.....	23
2.1.5 Konsep dan Teori Kebijakan Publik.....	27
2.1.6 Konsep dan Teori Evaluasi Kebijakan	29
2.1.7 Penelitian Terdahulu.....	34
2.2 Kerangka Pemikiran.....	36

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian	37
3.2 Lokasi Penelitian.....	37
3.3 Konsep Operasional dan Operasional Variabel	38
3.3.1 Konsep Operasional.....	38
3.3.2 Operasional Variabel.....	39
3.4 Populasi dan Sampel	40
3.5 Teknik penarikan sampel	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.7 Teknik Analisis Data.....	42
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian	43

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Deskripsi Umum Kabupaten Kepulauan Meranti	44
4.2 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti	46

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden.....	48
5.2 Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti).....	50
5.2.1. Efektivitas.....	53
5.2.2. Efisiensi	57
5.2.3. Kecukupan	61
5.2.4. Perataan	65
5.2.5. Responsivitas	70
5.2.6. Ketepatan.....	74
5.3 Hambatan Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti	82

BAB VI : PENUTUP

6.1 Kesimpulan 84
6.2 Saran 85

DAFTAR KEPUSTAKAAN 87

DAFTAR LAMPIRAN 90



DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II. 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti	36
VI. 1 : Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti	46

DAFTAR TABEL

Tabel :		Halaman
I.1	Program Kegiatan dalam pengelolaan Pasar Tahun 2016–2021	9
I.2	Jumlah Los, Kios Pasar Tanjung Harapan Di Kecamatan Tebing Tinggi 2018-2020.....	10
I.3	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Kepulauan Meranti 2018-2020	11
II.1	Penelitian Terdahulu	34
III.1	Operasional Variabel.....	39
III.2	Populasi Dan Sampel Penelitian	40
III.3	Jadwal Kegiatan Penelitian Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti	43
V.1	Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
V.2	Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Umur.....	49
V.3	Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...	50
V.4	Tanggapan Responden Berdasarkan Teori Dunn (2003;608) Dalam Indikator Efektivitas Dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	53
V.5	Tanggapan Responden Berdasarkan Teori Dunn (2003;608) Dalam Indikator Efisiensi Dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	55
V.6	Tanggapan Responden Berdasarkan Teori Dunn (2003;608) Dalam Indikator Kecukupan Dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	62

V.7	Tanggapan Responden Berdasarkan Teori Dunn (2003;608) Dalam Indikator Perataan Dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	66
V.8	Tanggapan Responden Berdasarkan Teori Dunn (2003;608) Dalam Indikator Responsivitas Dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	71
V.9	Tanggapan Responden Berdasarkan Teori Dunn (2003;608) Dalam Indikator Ketepatan Dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	75
V.10	Rekapitulasi Jawaban Tanggapan Responden Berdasarkan Teori Dunn (2003;608) Dalam Indikator Ketepatan Dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Kusiner Penelitian Tentang Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti)	90
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren Di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti)	95
3. Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden berdasarkan Indikator Penelitian.....	98
3. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren Di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti)	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Tujuan Negara Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya memajukan kesejahteraan umum. Sejalan dengan arus reformasi yang telah digulirkan dengan harapan agar aparat pemerintah dapat mendukung kelancaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Negara, dengan menerapkan pengawasan dan pelayanan kepada publik.

Tujuan pembentukan negara ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi utama Pemerintah adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi pemerintahan itu adalah pengemban tugas pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan sebaliknya untuk minta dilayani oleh masyarakat. Untuk itu pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakatnya sebagai bagian dari wujud pelayanan kepada masyarakat itu agar masyarakat dapat terpuaskan.

Dalam rangka pelaksanaan aza desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan Kearsipan.

Dengan otonomi daerah ini pemerintah daerah lebih bisa memainkan peran dan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan didaerah masing-masing. Sementara itu peranan masyarakat dalam pembangunan juga dapat lebih ditingkatkan karena perlu disadari tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, pembangunan tidak bisa diselenggarakan secara maksimal. Melalui otonomi kebijakan pemerintah daerah mempunyai peluang yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk

mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi, yang lebih untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan didaerahnya masing-masing sehingga akan muncullah daya kreasi dan daya inovasi untuk dapat bersaing kearah kemajuan dengan daerah lain.

Pemerintahan Daerah dalam Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebagai penyelenggaraan desentralisasi di Daerah yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhususan, dan potensi unggulan Daerah yang bersangkutan. Untuk merealisasikannya, diperlukan berbagai aspek yang memadai bagi pengembangan dunia usaha. Salah satu sarana perekonomian yang paling banyak ditemui di seluruh pelosok Indonesia adalah pasar dalam pengertian sederhana.

Kebijakan pemerintah dalam pencapaian hasil kinerja pemerintah tidak terlepas dari pembenahan hasil kegiatan pencapaian kinerja yang telah terlaksana melalui evaluasi sehingga tujuan pencapaian yang telah dilaksanakan tepat sasaran apa tidak, serta mengetahui letak kesalahan maupun pencapaian yang tidak maksimal agar adanya perbandingan dengan fakta dan kenyataan yang terealisasi.

Menurut (Dunn, 2000;608) evaluasi adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan

pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

Menurut Kansil dan cristine, (2008;190) Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelencaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Pasar adalah sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, pasar sendiri memiliki tiga fungsi distribusi pembentukan harga dan fungsi promosi. Pasar termasuk pada katagori kelompok social yang tidak teratur dimana dalam aktivitas yang terjadi dipasar selalu menimbulkan kerumunan yang saling berinteraksi baik untuk menjual maupun membeli.

Pengelolaan dan pengembangan pasar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar di dalam area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Pasar modern memiliki perubahan yang berbeda dengan pasar tradisional dimana pasar modern adalah perubahan dari bentuk pasar tradisional dengan merubah bentuk bangunan yang didalamnya terdiri dari los, kios atau tempat tempat bagi para pedagang yang di tata rapi guna kegiatan pasar lebih lebih layak dan tertata sehingga dapat dinikmati para pedagang dan pembeli.

Kecamatan Tebing Tinggi merupakan Kecamatan yang sedang berkembang dengan luas wilayah 849,50 km². dengan Jumlah penduduk di Kota sebanyak 37.243 jiwa. Kecamatan Tebing Tinggi merupakan kondisi geografis dataran rendah yang terdiri dari 5 Desa dan 4 Kelurahan.

Pasar modern Tanjung Harapan Kecamatan Tebing Tinggi merupakan pasar tradisional milik pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, pada tahun 2010 dimodernisasi atau dilakukan peremajaan dari pasar tradisional menjadi pasar modern yang kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT Makmur Permata Putra Nomor 530/Bupati-KPR/2010/01 tentang Kerjasama Bangunan Guna Serah (BGS) Pasar Tanjung harapan Kecamatan Tebing Tinggi. Pembangunan Pasar modern Tanjung harapan Kecamatan Tebing Tinggi dengan luas Bangunan (2x2) meter dengan harga Rp. 12.000.000,-per meter. dan Luas Bangunan Los (1,5 x 1,5) Meter dengan harga Rp. 9.000.000,-per meter, masing-masing Kios dan Los diangsur pembayarannya selama 5 (lima) Tahun, dengan sistem pembayaran per bulan melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

Unsur pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar melalui Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti pada pasal 3 dimana Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah terdiri dari :

- a. kepala;
- b. sekretariat, terdiri dari;
 - a. sub bagian perencanaan program;
 - c. sub bagian keuangan dan perlengkapan;
 - d. sub bagian umum dan kepegawaian.
- c. bidang perdagangan, terdiri dari;
 - a. seksi perdagangan dalam negeri, luar negeri dan pendaftaran perusahaan;
 - b. seksi sarana dan usaha perdagangan;
 - c. seksi pasar dan retribusi pasar.
- d. bidang perindustrian, terdiri dari;
 - 1) seksi agro dan kimia;
 - 2) seksi industri logam, mesin, elektronika, aneka dan kerajinan;
 - 3) seksi pengembangan perwilayahan industri.
- e. bidang metrologi legal, terdiri dari;
 - 1) seksi pengawasan kemetrologian;
 - 2) seksi pembinaan dan penyuluhan kemetrologian;
 - 3) seksi sarana dan prasarana kemetrologian.
- f. bidang koperasi dan ukm, terdiri dari;
 - 1) seksi kelembagaan koperasi;
 - 2) seksi pembinaan dan pengembangan umkm;
 - 3) seksi fasilitas pembiayaan dan jasa keuangan.
- g. unit pelaksana teknis dinas.
- h. kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah adalah

penetapan kinerja Dinas dalam bidang kinerja pegawai antar lain bidang pasar melalui Seksi Pasar dan retribusi pasar dalam pengelolaan pasar.

Berdasarkan penjelasan diatas dikata pada Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti pasal 13 Dalam pengelolaan pasar melalui Seksi Pasar dan Retribusi Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang Ketertiban Pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun Uraian Tugas Seksi Pasar dan Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. perencanaan kegiatan Seksi Pasar dan Retribusi Pasar berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik aparatur maupun publik serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan tugas Seksi Pasar dan Retribusi Pasar;
- c. pencarian, pengumpulan, penghimpunan dan pensistematikaan, pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pasar dan Retribusi Pasar;
- d. penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pasar dan retribusi pasar;
- e. penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengolahan dan Ketertiban pasar dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- f. pelaksanaan usaha Ketertiban Pasar terhadap para pedagang yang berada di Kios dan Los serta di tepi Jalan;
- g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/dinas terkait dan dengan lembaga lainnya dalam rangka Ketertiban Pasar;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan operasional Ketertiban Pasar;

- i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pasar dan Retribusi Pasar berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban bagi atasan;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kemajuan dalam pengelolaan pasar tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang telah ditetapkan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021. Strategi dan kebijakan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 6 tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2016–2021. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan bagaimana cara Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai tujuan, sasaran jangka menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kepulauan Meranti, dan target kinerja hasil (*Outcome*), hal ini menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kepulauan Meranti.

Berdasarkan tujuan sasaran strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kepulauan Meranti maka disusunlah program dengan rencana kegiatan dan sasaran setiap program dalam pengembangan pasar sebagai berikut :

Tabel I.1 Program Kegiatan dalam pengelolaan Pasar Tahun 2016–2021

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			Pencapaian	Biaya
1	Penataan Sarana dan Prasarana Usaha Perdagangan	Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Usaha Perdagangan	6 Dokumen	92,819,350
2	Penyebaran Informasi Pasar	Jumlah unit Papan Informasi	5 unit	134,470,500
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah sarana dan prasarana Pasar yang dibangun	28 Unit	2,015,000,000
4	Pengamanan dan Ketertiban Pasar	Jumlah Tenaga Keamanan Pasar yang tersedia	125 Orang	884,177,273
5	Penataan Tempat Berjualan Bagi Pedagang Musiman	Jumlah Tempat Jualan Musiman	300 Tenda	594,515,000

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kepulauan Meranti, 2021

Berdasarkan tabel diatas Program Kegiatan dalam pengelolaan Pasar Tahun 2016–2021 Di Kecamatan Tebing Tinggi adalah pencapaian tujuan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kepulauan Meranti dalam pencapaian hasil kinerja yang lebih optimal yang meliputi Penataan Sarana dan Prasarana Usaha Perdagangan, Penyebaran Informasi Pasar, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar, Pengamanan dan Ketertiban Pasar, Penataan Tempat Berjualan Bagi Pedagang Musiman. Menyikapi hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kepulauan Meranti sudah harus lebih maksimal didalam pengembangan pengelolaan pasar yang ada sehingga pasar dapat

berkembang dan tertata sehingga memiliki kontribusi didalam meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pelaksanaan Tugas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dalam pengelolaan pasar merupakan arah efektivitas dinas pasar mengarah pengelolaan pasar tepat sararan dan tepat guna terhadap masyarakat dengan melakukan pembangunan pasar, penataan pasar, penagihan retribusi terhadap pedagang serta melakukan pengarah peminan penempatan pengguna fasilitas pasar.

Pembangunan pasar tidak terlepas dari bangunan dan penataan isinya sehingga pasar dapat dinikmati dan dapat digunakan. Adapun berikut ini dapat dilihat jumlah bangunan Pasar yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Pasar Inpres sebagai berikut :

Tabel I.2 Jumlah Los, Kios Pasar Tanjung Harapan Di Kecamatan Tebing Tinggi 2018-2020.

No	Tahun	Bangunan Pasar Inpres					
		Kios		Los		Jumlah Los, Kios terpakai	Jumlah Los, Kios tidak terpakai
		Terpakai	Kosong	Terpakai	Kosong		
1	2018	31	-	150	-	181	-
2	2019	20	20	397	503	417	523
3	2020	20	23	357	543	377	566

Sumber : Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021

Berdasarkan tabel diatas dimana dari jumlah bangunan Pasar Tanjung Harapan Di Kecamatan Tebing Tinggi tahun 2018 sampai dengan 2020 meliputi Ruko, Los, Kios yang ada diKecamatan Tebing Tinggi dengan jumlah Ruko terpakai pada tahun 2018 sejumlah 31 Kios dan tidak ada yang kosong, Los

terpakai sebanyak 150 Kios dan tidak adanya yang kosong, Tahun 2019 Kios terpakai sebanyak 20 dan kosong sebanyak 20, Los terpakai sebanyak 397 dan kosong sebanyak 503, Tahun 2020 sejumlah kios sebanyak 20 dan kosong sebanyak 23, Los terpakai sebanyak 357 Kios dan kosong sebanyak 543. Dimana Diketahui Pembangunan Pasar Inpres mengalami penurunan dalam pemakaiannya pada tahun 2018 sampai dengan 2019 hal ini Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah selayaknya lebih optimal dalam mengelolah pasar agar tepat guna serta tercapainya penerimaan retribusi pengguna pasar.

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengelolaan pasar di Kecamatan Tebing Tinggi dengan membangun tempat perbelanjaan yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berjual beli dalam bentuk Kios dan Los. Pembangunan ini bertujuan agar tertatanya penempatan perbelanjaan dengan baik pada tempatnya, dengan demikian Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengelolaan pasar terhadap pedagang dengan menetapkan retribusi terhadap penggunan Kios dan Los sebagai penetapan peraturan bagi penggunan pasar yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi. Adapun jumlah pendapatan Retribusi pasar di Kecamatan Tebing Tinggi sebagai berikut :

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Kepulauan Meranti 2018-2020

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2018	75.000.000	41.500,000	55,33%
2	2019	75.000.000	40.700,000	54,26%
3	2020	75.000.000	40.500,000	54, %

Sumber :Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti, 2020

Berdasarkan table diatas Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Kepulauan Meranti 2018-2020 dimana realisasi penerimaan retribusi setiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini menunjukkan jika retribusi pasar memiliki potensi untuk ditingkatkan, dengan meningkatnya retribusi pelayanan pasar akan memberikan kontribusi kepada daerah dan mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi pelayanan pasar pada pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pengelolaan pasar Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengelolaan pasar dalam ini pelaksanaan tugas tersebut belum terlaksana dengan maksimal mulai dari penempatan los dan kios serta penerimaan retribusi pasar. Adapun fenomena dalam Pengelolaan Pasar Modren Tanjung Harapan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar melalui tugas yang terlaksana belum berlangsung dengan baik dimana masih ditemui beberapa hal yang masih menjadi gejala dan masalah menyangkut Pengelolahan Pasar yang meliputi :

1. Diketahui bahwa efektifitas pengeloaan pasar oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana dengan optimal melalui pembangunan dan penetapan Kios, Los sesuai dengan pengembangan pasar sehingga pedagang banyak berjualan tidak pada tempat yang telah disediakan melainkan diluar gedung pasar, hal ini dapat dilihat pada tabel

- I.2. sehingga hal ini berdampak terhadap pedagang yang berada di Kios, Los yang disediakan beralih keluar gedung untuk berjualan.
2. Diketahui bahwa pencapaian penerimaan retribusi pasar belum sesuai dengan target dan realisasi yang ditetapkan, terlihat pada table I.3 penerimaan retribusi setiap tahunnya mengalami penurunan. hal ini dikarenakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti belum mengarahkan pedagang ke dalam gedung pasar sesuai dengan tempat yang telah disediakan.
 3. Belum maksimalnya pengawasan, serta sanksi oleh petugas pengelolaan pasar sehingga mengakibatkan masih ditemui pedagang yang berjualan tidak pada penempatannya.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sangat berbeda dengan keinginan Masyarakat yang mengharapkan adanya peningkatan kualitas tugas pengelolaan pasar terhadap penaganan para pedangan di luar gedung pasar. Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengemukakan judul : **Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren Di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.**

1.2 Perumusan Masalah

Pengelolaan pasar sangatlah penting mulai dari penempatan Kios, Los dan Pedagang kaki lima bagi pertumbuhan kegiatan aktivitas berjual beli, sehingga pasar dapat dinikmati oleh pengunjung sehingga berdampak terhadap pendapatan Asli daerah. Hal ini sangatlah penting tugas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengelolaan Pasar dan pengembangannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka perumusan permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Hasil Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan masalah tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini mempunyai manfaat :

1. Secara akademis bermanfaat Sebagai bahan wawasan keilmuan baik kepada penulis maupun pembaca sebagai konsep-konsep baru yang berkenaan dengan Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren.

2. Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan Ilmu Administrasi publik dan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang yang sama.
3. Secara Praktis, penelitian ini dapat di harapkan memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah untuk sebagai bahan pertimbangan dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 STUDI KEPUSTAKAAN

2.1. Studi Kepustakaan

2.1.1 Konsep dan teori Administrasi Publik

a. Konsep Administrasi

Secara terminologi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Faried Ali (2011;19) apa yang disebut “Administrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelola. Mengurus diarahkan pada penciptaan keteraturan sebab pengurusan yang teratur menghasilkan pencapaian tujuan yang tepat atau pada tujuan yang diinginkan. Mengatur diarahkan pada penciptaan keteraturan, serta mengelola diarahkan pada kegiatan yang berlangsung secara holistik.

Syafri (2012;3) mengatakan administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/insitusi.

Sedangkan menurut Mustopadidjaja (2003;9) Administrasi Negara adalah : merupakan semua kegiatan dan tindakan dilakukan untuk mengatur urusan-urusan Negara yang menyangkut kepentingan Negara yang bersangkutan. Dalam sebuah administrasi terdapat prinsip-prinsip yang diyakini sebagai pegangan atau acuan yang sebagai pendukung dalam upaya pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan.

Atmosudirdjo (dalam Zulkifli 2009;9) merumuskan ragam pengertian untuk menerangkan lingkup konsep Administrasi yaitu :

- a. Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (*activity*) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung didalamnya.
- b. Organisasi modern sebagai badan, adalah organisasi yang mempunyai konstitusi dan statute yang tertentu sehingga jelas apa yang menjadi maksud (*purpose*) dan tujuan-tujuan (*goals*), usahanya, sumber pendanaannya (*financial resources*), serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuannya.
- c. Setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggung jawab) dan dipimpin (yang menggerakkan secara terarah dan bertujuan) oleh Administrator.
- d. Administrator bisa perorangan bisa suatu dewan.
- e. Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabannya melalui apa yang disebut administrasi.

Zulkifli (2009;32) memandang administrasi sebagai suatu proses, aktivitasnya diawali oleh menetapkan suatu kebijakan, dan selanjutnya kebijakan tersebut dilaksanakan melalui proses kerjasama dari sekelompok orang untuuk mencapai sasaran atau sejumlah tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam studi administrasi, tujuan yang dimaksud itu adalah tujuan ideal (teoritis) setiap organisasi, yaitu menciptakan efektifitas dan efesiensi dalam sekuruh bidang kegiatan organisasi.

Hal lain yang dapat dicermati dari sejumlah defenisi tersebut adalah bahwa prioritas utama administrasi terciptanya tingkat efektifitas dan efesiensi yang optimal, baik dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas utama dan aktivitas penunjang maupun dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

b. Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik di Indonesia dikenal dengan istilah Administrasi Negara yakni salah satu aspek dari kegiatan Pemerintahan (Kasim, 1993;21). Menurut Gordon (dalam Kasim 1993;22) administrasi publik adalah studi tentang seluruh proses, organisasi dan individu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan. Definisi ini secara implisit menganggap administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik.

Land dan Rosenbloom (dalam Kasim, 1998;98) menyatakan administrasi public harus dilaksanakan dengan melihat kebutuhan masyarakat. Administrasi publik diharapkan dapat bekerja secara efisien dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang dianggap sebagai konsumen, sebagaimana halnya perusahaan swasta. Pendekatan ini disebut pendekatan populis yang menginginkan administrasi publik agar lebih dikendalikan oleh kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan.

Pembahasan konsep administrasi publik menurut Bailey (dalam Henry, 1989;106) harus diarahkan pada empat jenis teori, yakni:

1. Teori deskriptif: deskripsi struktur hirarkis dan hubungan timbal-balik dengan lingkungan tugasnya.
2. Teori normative : tujuan nilai di bidangnya –yakni apa yang oleh administrasi publik (praktisi) harus dikerjakan, keputusan alternatif yang dibuat dan kebijakan apa yang harus dipelajari dan direkomendasikan oleh pakar administrasi publik kepada praktisi.
3. Teori asumptif: pemahaman yang rigorous mengenai kenyataan personal atau administratif yang tidak menganggap birokrat publik sebagai malaikat atau setan.
4. Teori instrumental : peningkatan pemahaman teknik manajerial bagi efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan publik

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah proses suatu organisasi maupun individu dalam melaksanakan tujuannya sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan seluruh proses kebijakan public.

2.1.2 Konsep dan Teori Organisasi Publik

a. Konsep Organisasi

Konsep organisasi merupakan titik sentral dan tujuan aplikasinya setiap aspek studi administrasi. Karena keberadaan setiap aspek studi administrasi itu dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada kebijakan manajerial dan operasional dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Siagian (dalam Zulkifli, 2005;25) merumuskan defenisi organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan bawahan.

Sebagai suatu proses organisasi bearti serangkaian aktifitas kolektif dari orang-orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan tugas. (Zulkifli, 2005;26).

Sedangkan menurut Hamim (2005;24) menjelaskan bahwa Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompoknya harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk

menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa memberi saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Hasibuan (2006;24) bahwa organisasi adalah suatu system perserikatan formal berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu.

b. Organisasi Publik

Istilah publik berasal dari privat berasal dari bahasa Latin, di mana publik berarti "*of people*" (yang berkenaan dengan masyarakat) sementara privat berarti "*set apart*" (yang terpisah) dalam literatur administrasi publik, pengertian organisasi publik bermula dari konsep "barang publik" (*publik goods*), yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-individu Kusdi, (2009:25). Konsep ini menunjukkan adanya produk-produk yang bersifat kolektif dan harus diupayakan secara kolektif pula. Inilah alasan mengapa organisasi publik harus diadakan.

Kita bisa menyebutkan beberapa bidang tertentu yang bersifat kolektif di mana organisasi publik memainkan peranannya, misalnya penegakkan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan nasional, dan lain sebagainya. Semua ini tidak bisa diupayakan secara individual. Jadi, secara sederhananya, organisasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan-pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa fungsi

organisasi publik adalah mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan Organisasi publik adalah yang memiliki ciri-ciri :1). Organisasi yang terbesar, 2). Yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara, 3). Mempunyai kewenangan yang absah dibidang politik, administrasi Pemerintahan dan hukum secara terlembaga, 4). Sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya 5). Melayani keperluannya 6). Sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendaan 7) serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. Organ isasi public sering dilihat pada bentuk organisasi Pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi Pemerintah (organisasi Pemerintahan), atau satu-satunya organisasi didunia yang mempunyai wewenang merampok harta rakyat (pajak), membunuh rakyat (hukuman mati) dan memenjarakan rakyat.

2.1.3 Konsep dan Teori Manajemen Publik

a. Konsep Manajemen

Manajemen secara umum merupakan proses pencapaian tujuan melalui dinamika kerja sama manusia atau melalui kegiatan orang lain. Untuk lebih jelasnya, Winardi (2009;3) mengemukakan pandangan manajemen adalah merupakan sebuah proses khusus yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan (*actuating*), dan tindakan pengawas (*controlling*), yang dilaksanakan untuk mendeterminasikan dan mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lainnya.

Menurut Hasibuan (2006;71) Fungsi evaluasi dalam manajemen karena evaluasi seperti yang diketahui dari arti dari Evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif atau negatif atau merupakan gabungan dari keduanya. Saat sesuatu dievaluasi biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya. Penilaian harus dikembangkan bersama perencanaan suatu program. Penilaian pada kegiatan evaluasi dilakukan pada komponen input, proses dan output. Penilaian selalu terkait dengan proses pengambilan keputusan.

Menurut Hasibuan (2006;77) Unsur-Unsur Evaluasi Dalam Manajemen

Antara lain:

a. Kemampuan

Untuk dapat mengikuti program dalam program kerja, pekerja harus memiliki kemampuan yang sepadan.

b. Kepribadian

Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri manusia dan menampakkan bentuknya dalam tingkah laku. Dalam hal-hal tertentu, informasi tentang kepribadian sangat diperlukan.

c. Sikap-sikap

Sebenarnya sikap ini merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar. Namun karena sikap ini merupakan sesuatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan maka banyak orang yang menginginkan informasi khusus tentangnya.

d. Inteligensi

Untuk mengetahui tingkat inteligensi ini digunakan tes inteligensi yang sudah banyak diciptakan oleh para ahli.

b. Konsep Manajemen Publik

Manajemen publik adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik (*public administration*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, manajemen Pemerintahan, tidak lain adalah

faktor upaya dalam suatu organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga negara dan masyarakatnya (Waluyo, 2007;23)

Winardi (2010;79) menyebutkan bahwa, tugas Pemerintahan yang paling dominan adalah menyediakan barang-barang publik (*public utility*) dan memberikan pelayanan (*public service*) misalnya dalam bidang-bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, perkembangan perlindungan tenaga kerja, pertanian, keamanan dan sebagainya. Dalam Winardi memberikan argumentasi bahwa manajemen Pemerintahan sebagai proses pencapaian tujuan Pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah, aparatur negara di masyarakat harus memperhatikan prinsip umum manajerial Pemerintahan sebagai berikut :

1. Adanya pembagian kerja
2. Kewenangan dan tanggung jawab yang jelas
3. Mekanisme kerja yang jelas
4. Penghargaan terhadap setiap anggota
5. Etos kerja yang tinggi
6. Penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik
7. Budaya kerja yang dilandasi nilai kejujuran yang tinggi
8. Antisipatif

2.1.4 Konsep dan Teori Manajemen strategik

Siagian (2004;78) mendefinisikan, manajemen strategik sebagai serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Manajemen strategik tidak hanya

digunakan pada sektor swasta tetapi juga sudah diterapkan pada sektor publik. Penerapan manajemen strategik pada kedua jenis institusi tersebut tidaklah jauh berbeda, hanya pada organisasi sektor publik tidak menekankan tujuan organisasi pada pencarian laba tetapi lebih pada pelayanan

Siagian (2004;93) mengemukakan, manajemen Strategi Sektor Publik sebagai suatu rangkaian keputusan serta tindakan yang disusun oleh manajemen puncak dan kemudian diimplementasi oleh semua jajaran entitas atau organisasi dalam kerangka pencapaian tujuan yang ditetapkan organisasi tersebut. Manajemen strategi tidak hanya dipergunakan pada sektor swasta namun juga telah diterapkan pada sektor publik. Penerapan manajemen strategi pada ke-2 jenis entitas tersebut sebenarnya tidaklah terlampau jauh berbeda, hanya saja pada institusi sektor publik tidak menekankan pada tujuan organisasi dalam mencari laba namun lebih kepada pelayanan untuk masyarakat.

Menurut Hadari Nawawi (2005;148- 149), manajemen strategik adalah perencanaan berskala besar (disebut perencanaan strategik) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi), dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil, agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut misi), dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang dan/atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategis) dan berbagai sasaran (tujuan operasional) organisasi.

Menurut Supriyono (2001:77) Manajemen strategik merupakan pendekatan sistematis untuk memformulasikan, mewujudkan dan monitoring strategi (Rabin et.al 2000:1). Manajemen strategik merujuk pada proses manajerial untuk membentuk visi strategi, penyusunan obyektif, penciptaan strategi mewujudkan dan melaksanakan strategi dan kemudian sepanjang waktu melakukan penyesuaian dan koreksi terhadap visi, obyektif strategi dan pelaksanaan tersebut.

Manajemen Stretegik merupakan proses dengan sejumlah tahapan salaing berkaitan dan berurutan. Tahapan atau proses manajemen strategis menurut Roup Purohim, (2012;71) dengan tahapan analisis situasi, formulasi strategi, implementasi dan evaluasi kinerja. Analisis situasi atau lingkungan merupakan pendeteksian dan evaluasi organisasi (perusahaan) pada lingkungan eksternal dan internal. Formulasi strategi adalah desain dan pilihan strategi yang sesuai pada setiap level bisnis sedangkan implementasi strategi merupakan proses melaksanakan strategi yang telah diformulasikan dan evaluasi strategi merupakan proses evaluasi implementasi srtategi dan sejauh mana mempengaruhi kinerja untuk meraih keuntungan atau pencapaian tujuan.

Menurut Salusu (2006: 496-498), mengemukakan beberapa alasan perlunya perubahan strategis yang sekaligus memberikan petunjuk tentang bagaimana manfaat manajemen strategis bagi organisasi publik maupun organisasi nonprofit sebagai berikut:

2. Organisasi baru atau yang sedang berkembang harus memikirkan langkah tujuan dan sasaran yang diprioritaskan
3. Kebutuhan mempertahankan stabilitas pembiayaan yang memerlukan strategi-strategi baru untuk mencari sumber pembiayaan baru

4. Keinginan mengembangkan pelayanan, seiring makin tersedianya sumberdaya yang dimiliki, mendorong manajer melakukan perubahan kebijakan, prosedur, bahkan mungkin prioritas konsumen yang dilayani
5. Perluasan peranan karena desakan publik, untuk menjawab kebutuhan mereka Perubahan kepemimpinan biasanya diikuti dengan visi baru yang menuntut para eksekutif memahami kebijakan baru
6. Tuntutan yuridis dalam perencanaan yang memungkinkan perubahan prosedur bila ada desakan pemerintah untuk memperoleh bantuan yang diperlukan
7. Tuntutan akan integrasi antar departemen, biro, bidang, bagian, seksi dan lain-lain sangat sering terjadi dalam organisasi pemerintahan yang menuntut penyesuaian misi, tujuan, serta berbagai prosedur
8. Koordinasi tindakan yang menuntut adanya perubahan dalam kebijaksanaan internal
9. Ancaman politik yang menuntut para eksekutif menyesuaikan kebijaksanaan organisasinya dengan tuntutan tersebut.

Menurut Ibrahim (2008: 24) manajemen strategik pada prinsipnya adalah kemampuan manajemen organisasi untuk mengadaptasi masa depan yang umumnya bersifat jangka pendek serta menengah, proses manajemen strategik meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengawasan perubahan lingkungan
2. Identifikasi lingkungan peluang dan ancaman untuk dihindarkan
3. Evaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi
4. Perumusan misi dan sasaran
5. Identifikasi strategi untuk pencapaian tujuan organisasi
6. Evaluasi strategi dan pilihan strategi yang akan diimplementasikan
7. Penetapan dan pemantauan proses untuk meyakinkan bahwa strategi diimplementasikan dengan tepat.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Manajemen strategik merujuk pada proses manajerial untuk membentuk visi strategi, penyusunan obyektif, penciptaan strategi mewujudkan dan melaksanakan strategi dan kemudian sepanjang waktu melakukan penyesuaian dan koreksi terhadap visi, obyektif strategi dan pelaksanaan tersebut

2.1.5 Konsep dan Teori Kebijakan Publik

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan serta tujuan berdirinya Negara dapat tercapai.

Menurut Partowidagdo dalam anwar (2011;42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Menurut Dunn (2003;105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparat pemerintah sehingga tercapai kelencaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan cristine, 2008;190)

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan, 2003;3) menyatakan bahwa “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa :

1. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebiiijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakn apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut Syafiie (2005;150) menyebutkan :”Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi *public polic*, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Raksasataya (dalam Islamy, 2007;17) memuat tiga elemen kebijaksanaan yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Kebijaksanaan menurut Friedrich adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (dalam Wahab 2004;3).

Tangkilisan (2003;6) menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan public merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan sebagai yang dimiliki ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif(masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Koryati (2005:7) mengemukakan bahwa secara umum kebijakan public dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan direncanakan secara jelas.

Selanjutnya dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan, sehingga pengawasan dapat diartikan meliputi, mengawasi berjalan dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan. Menilainya dan mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

2.1.6 Konsep dan Teori Evaluasi Kebijakan

Menurut Nurcholis (2005;169) evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Maka untuk dapat

mengetahui hasil kegiatan atau program yang telah direncanakan dengan evaluasi dapat diketahui hambatan ataupun kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Jika dilihat dari pentahapannya, Wahab (2004;3) secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Evaluasi tahap perencanaan

Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

Dalam melakukan proses evaluasi kebijakan ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, Dunn (2002;8) antara lain :

1. Suatu tugas atau tanggungjawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas
2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.
5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.
6. Hendaknya hubungan dengan proses harus di dasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan (Solichin

Abdul Wahad, 2002;51), yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri (William N Dunn, 2000;8) yaitu :

1. Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada priode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relevan.
2. Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. Assessment, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan.

Dalam melakukan evaluasi dengan menentukan nilai-nilai ada beberapa faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut diantaranya :

1. Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai
2. Tersedianya dana, dan prasarana yang diperlukan.
3. Pengetahuan dan keterampilan majerial tinggi dari pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
4. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja tinggi dari pada pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
5. Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan dan visi,misi sasaran jangka panjang.

Ndraha (2005;102) juga mengatakan evaluasi kebijakan merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :

1. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku,treatment) tolak ukur adalah *before*
2. Model kelompok *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur *das solen*.
3. Model kelompok kontrol-kontrol-kelompok tes yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberiperlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Menurut Dunn, (2003;608) yang mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah kebijakan yang menentukan arah yang lebih baik dari sebelumnya yang mengandung kriteria sebagai berikut:

1. Efektivitas yaitu keinginan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
2. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.
3. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan
4. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya.
5. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
6. Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan teori diatas bahwa Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat

melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Heri Marzuki, 2011. Vol. 2	Analisis Kebijakan Pelaksanaan Tugas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Penataan Pasar Cik Puan	1. Sama-sama meneliti pengelolaan sampah. 2. Metode Kuantitatif. 3. Teori evaluasi	1. Lebih spesifik kepada tugas dinas 2. Lokasi Penelitian berbeda. 3. Hasil penelitian
2	Arindiah Citra Dewi Agustin, 2010. Vol. 2	Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan penataan Pasar Modren oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten pelalawan	1. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara 2. Objek penelitian. 3. Lokasi penelitian.	1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif 2. Teori yang digunakan. 3. Hasil penelitian
3	Hentry Sukmasari, 2011. Vol. 2	Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan penataan Pasar Modren oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten pelalawan	1. Objek penelitian 2. Jumlah Informan. 3. Metode pengumpulan data Observasi dan Dokumentasi	1. Teori yang digunakan. 2. Metode kuantitatif. 3. Lokasi penelitian. 4. Menganalisis Evaluasi 5. Hasil penelitian
4	Bekti Rahayu (2017). Vol. 4	Nalisis Strategi Pengelolaan Pasar Johar Oleh Dinas Pasar Kota Semarang	1. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara 2. Objek penelitian.	1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif . 2. Mengkaji stRATEGI 3. Teori yang digunakan. 4. Lokasi penelitian. 5. Hasil penelitian
5	Rusham 2016 Vol. 10	Analisis Dampak Pertumbuhan Pasar Moderen Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Di Kabupaten Bekasi	1. Objek penelitian 2. Jumlah Informan. 3. Metode pengumpulan data Observasi dan Dokumentasi	1. Teori yang digunakan. 2. Metode kuantitatif. 3. Lokasi penelitian. 4. Menganalisis analisis 5. Hasil penelitian

6	Windi Fauziyyah Safitri. 2018. Vol 4	Analisis Pengelolaan Pasar Semi Modern Di Kabupaten Sumedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian 2. Jumlah Informan. 3. Metode pengumpulan data Observasi dan Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori yang digunakan. 2. Metode kuantitatif. 3. Lokasi penelitian. 4. Menganalisis pengelolaan 5. Hasil penelitian
7	Evi Revitasari. 2018. Vol. 4	Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten Lebak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara 2. Objek penelitian. 3. Lokasi penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif 2. Teori yang digunakan. 3. Hasil penelitian
8	Eka Nurwanta. 2016. Vol. 2	Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Toko Modern berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Dalam Kerangka Otonomi Daerah di Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara 2. Objek penelitian. 3. Lokasi penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif 2. Teori yang digunakan. 3. Hasil penelitian
9	Arip Rahman Sudrajat. 2016. Vol. 6	Perumusan Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara 2. Objek penelitian. 3. Lokasi penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif 2. Teori yang digunakan. 3. Hasil penelitian
10	Luluk Nur Azizah. 2019. Vol. 4.	Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil (Studi Kasus Pasar Kiringan Desa Kemlagilor Turi Lamongan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara 2. Objek penelitian. 3. Lokasi penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif 2. Teori yang digunakan. 3. Hasil penelitian

Sumber : Penelitian Terdahulu. 2021

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber : Modifikasi penelitian 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian survey deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan serta menggambarkan kenyataan yang ada. Pendekatan deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena atau kenyataan. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Metode Kualitatif suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana ia terlihat, terdengar, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajarnya mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu dicatat sebagaimana ia keluar dari sumbernya. Kemudian untuk melengkapi sumber data maka dilakukan juga pendekatan kuantitatif berupa tabel frekuensi. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti hal ini diketahui bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti belum dapat melaksanakan Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan baik mulai dari penataan Pedagang Kaki Lima, Los, Kios sehingga menghambat aktivitas kelancaran kegiatan perbelanjaan serta mengurangi pendapatan asli daerah.

3.3 Konsep Operasional dan Operasionalisasi Variabel

3.3.1 Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaa penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

1. Evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang, baik itu dari jabatan strukturnya atau keahliannya, dengan mengidentifikasi mengenai pelaksanaan atau penerapan kebijakan ke arah yang lebih baik.
2. Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti Meranti dalam Pengelolaan Pasar di Kecamatan Tebing Tinggi
3. Pengelola pasar dalam penelitian ini adalah pemerintah yang berkaitan langsung dalam kemajuan pasar.
4. Pasar Tebing Tinggi dalam hal ini adalah tempat perbelanjaan masyarakat diKecamatan Tebing Tinggi.

Adapun indikator yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah :

5. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
6. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.

7. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan
8. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya.
9. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
10. Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan.

3.3.2 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai/Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Evaluasi ialah penaksiran (<i>appraisal</i>) pemberian angka (<i>rating</i>) dan penilaian (<i>asement</i>), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, nilai atau	Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti)	Efektivitas	1. Penataan Pasar. 2. Penempatan Pedagang.	Ordinal
		Efisiensi	1. Pelaksanaan Penertiban Pasar 2. Penetapan kegiatan pengelolaan pasar.	Ordinal
		Kecukupan	1. Kerjasama Petugas Pasar 2. Kerjasama dengan Pedangan.	Ordinal

1	2	3	4	5
manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah dibuat jelas dan diatasi (Dunn, 2003 :608)	Evaluasi Kebijakan	Perataan	1. Memberikan pelayanan terhadap pengguna pasar. 2. Pemberian pembinaan pengguna kios, los.	Ordinal
		Responsivitas	1. Penetapan kebersihan pasar. 2. Penyediaan fasilitas pasar.	Ordinal
		Ketepatan	1. Melakukan. Pengawasan kegiatan pasar. 2. Pemberian Sanksi.	Ordinal

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

3.4. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini subyek penelitian melalui key informan dijadikan sebagai pangkal informasi didalam melakukan penelitian dan pengumpulan informasi. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang lainnya beserta staf selain membidangin pengelolaan pasar, dan Pedagang Pasar. Kemudian responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pasar beserta staf, Pegawai membidangi pengelolaan pasa. Adapun Subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 : Populasi dan Sampel Penelitian

NO	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Informan			
	Kepala Bidang Perdagangan	1	1	100%
	Kepala Seksi Pasar Dan Retribusi Pasar	1	1	100%
	Pengunjung pasar	1	1	100%
2	Responden			
	Petugas Pasar	5	5	100%
	Pedagang Kios, Los.	377	45	20%
	Jumlah	163	53	25%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

3.5 Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Kepala dinas, Kepala Bidang dan Staf beserta Pegawai Bidang Pasar digunakan teknik penarikan sampel secara sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar sehingga populasi dijadikan sampel secara menyeluruh dengan jumlah 7 Sampel.

Sementara itu terhadap Pedagang Kios, Los dan Kaki Lima menggunakan teknik Purposive Sampling yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu dengan jumlah sebanyak 45 responden.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subjek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian.

2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yaitu melalui Kepala Dinas Kepala Bidang dan Pedagang Pasar.

3. Kuesioner

Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai Pelaksanaan Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kuisisioner di berikan kepada responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pasar, Pegawai Bidang Pasar.

4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar gambaran Pelaksanaan Program Kegiatan Revitalisasi Pasar

Modren Di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diketahui.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.Deskripsi Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008. Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30''$ - $1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0''$ - $103^{\circ} 10' 0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalamdaerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triagle*) Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT). Secara tidak langsung, daerah inimenjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam-Tj. Balai Karimun.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara atau Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut. Hal ini untuk melengkapi Kabupaten kepulauan meranti yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara, yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industry Luas kabupaten Kepulauan Meranti mencapai, 3707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang sebagai ibukotanya adalah 45,44 km².

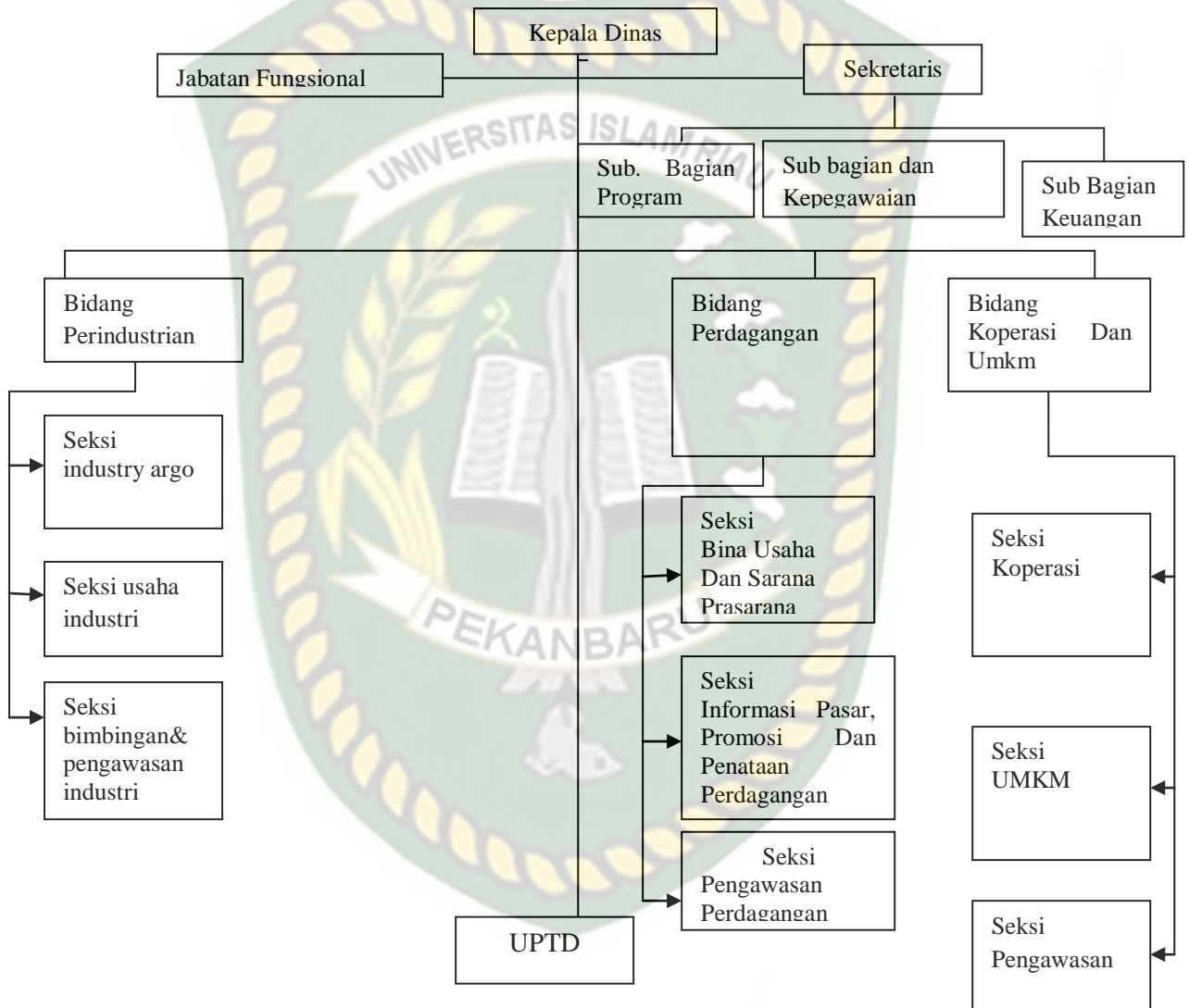
Batas –batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang baru dimekarkan lima tahun silam. Di Kabupaten Kepulauan Meranti telah terjadi perkembangan pada berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat tujuh agama yang dianut oleh masyarakat, yaitu Islam 160,585 Jiwa, Kristen 12,370 jiwa, Katolik 168 jiwa, Budha 23,961 jiwa, Konguchu 1,374 jiwa, dan Hindu 75 jiwa. Sarana ibadah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Masjid 243 buah, Mushalla 300 buah, Gereja 15 buah, dan Vihara 37 buah. Bukan hanya agama yang beragam tetapi terdapat banyak etnis di Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni Melayu, Minangkabau, Bugis, Batak, Jawa, dan Tionghoa.

4.2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti

Gamba IV.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti



Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari :

- a. kepala;
- b. sekretariat, terdiri dari;
 - 1) sub bagian perencanaan program:

- 2) sub bagian keuangan dan perlengkapan;
 - 3) sub bagian umum dan kepegawaian.
- d. bidang perdagangan, terdiri dari;
- 1) seksi perdagangan dalam negeri, luar negeri dan pendaftaran perusahaan;
 - 2) seksi sarana dan usaha perdagangan;
 - 3) seksi pasar dan retribusi pasar.
- f. bidang perindustrian, terdiri dari;
- 1) seksi agro dan kimia;
 - 2) seksi industri logam, mesin, elektronika, aneka dan kerajinan;
 - 3) seksi pengembangan perwilayahan industri.
- g. bidang metrologi legal, terdiri dari;
- 1) seksi pengawasan kemetrologian;
 - 2) seksi pembinaan dan penyuluhan kemetrologian;
 - 3) seksi sarana dan prasarana kemetrologian.
- i. bidang koperasi dan ukm, terdiri dari;
- 1) seksi kelembagaan koperasi;
 - 2) seksi pembinaan dan pengembangan umkm;
 - 3) seksi fasilitas pembiayaan dan jasa keuangan.
- j. unit pelaksana teknis dinas.
- k. kelompok jabatan fungsional.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti). Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

5.1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuisioner, dan wawancara yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden. dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingkat analisis yang akan diberikan dalam menilai Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti). Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.1. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Laki-Laki	20	38%
2	Perempuan	32	62%
Jumlah		52	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara perempuan dengan jumlah 32 responden atau sekitar 62%, hal ini disebabkan perempuan adalah responden yang banyak berperan dalam melakukan kegiatan Pasar. Selanjutnya responden jenis kelamin laki-laki sebanyak 20 responden hal ini diketahui laki-laki adalah jumlah yang sedikit dalam kegiatan pasar. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selajutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel IV.2. Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	-	-
2	25-39 tahun	12	23%
3	40-49 tahun	32	62%
4	≥ 50 tahun	8	15%
Jumlah		52	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 40-49 tahun dengan jumlah 32 orang atau sekitar 62%, hal ini disebabkan karena usia 40-49 tahun merupakan usia yang produktif dan aktif dalam melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan. Kemudian usia responden umur 25-39 sebanyak 12 orang atau sekitar 23% dan selebihnya yaitu berusia 50 keatas berjumlah 8 orang atau sekitar 16% dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan

factor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.3. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
2	SMP	15	29%
3	SMA	31	59%
4	Diploma	3	6%
5	Sarjana	3	6%
Jumlah		52	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah SMA sebanyak 30 orang atau sekitar 59%, SMP sebanyak 15 orang atau sekitar 29%, Diploma 3 orang atau sekitar 6% dan sarjana 3 orang atau sekitar 23% dari keseluruhan jumlah responden.

5.2. Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti)

Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan penetapan kebijakan Pengelolaan dan pengembangan pasar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha.

Pasar modern Tanjung harapan Kecamatan Tebing Tinggi merupakan pasar tradisional milik pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, pada tahun 2010 dimodernisasi atau dilakukan peremajaan dari pasar tradisional menjadi pasar modern yang kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT Makmur Permata Putra Nomor 530/Bupati-KPR/2010/01 tentang Kerjasama Bangunan Guna Serah (BGS) Pasar Tanjung harapan Kecamatan Tebing Tinggi. Pembangunan Pasar modern Tanjung harapan Kecamatan Tebing Tinggi dengan luas Bangunan (2x2) meter dengan harga Rp. 12.000.000,-per meter. dan Luas Bangunan Los (1,5 x 1,5) Meter dengan harga Rp. 9.000.000,-per meter, masing-masing Kios dan Los diangsur pembayarannya selama 5 (lima) Tahun, dengan sistem pembayaran per bulan melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

Unsur pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar melalui Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021. Strategi dan kebijakan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 6 tahun mengacu

kepada RPJMD tahun 2016–2021. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan bagaimana cara Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai tujuan, sasaran jangka menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kepulauan Meranti, dan target kinerja hasil (*Outcome*), hal ini menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kepulauan Meranti.

Program Kegiatan dalam pengelolaan Pasar Tahun 2016–2021 Di Kecamatan Tebing Tinggi adalah pencapaian tujuan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kepulauan Meranti dalam pencapaian hasil kinerja yang lebih optimal yang meliputi Penataan Sarana dan Prasarana Usaha Perdagangan, Penyebaran Informasi Pasar, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar, Pengamanan dan Ketertiban Pasar, Penataan Tempat Berjualan Bagi Pedagang Musiman. Menyikapi hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kepulauan Meranti sudah harus lebih maksimal didalam pengembangan pengelolaan pasar yang ada sehingga pasar dapat berkembang dan tertata sehingga memiliki kontribusi didalam meningkatkan pendapatan asli Daerah. Penetapan target dan realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Modern di Kabupaten Kepulauan dimana realisasi penerimaan retribusi setiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini menunjukkan jika retribusi pasar memiliki potensi untuk ditingkatkan, dengan meningkatnya retribusi pelayanan pasar akan memberikan kontribusi kepada daerah dan mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi pelayanan pasar pada pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk mengetahui Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sebagai berikut :

5.2.1. Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan terarahnya kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Efektivitas yang terlaksana yaitu :

1. Penataan Pasar.
2. Penempatan Pedagang.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan bidang pengelolaan pasar dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.4. Tanggapan Responden Berdasarkan Teori Dunn (2003;608) Dalam Indikator Efektivitas Dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Penataan Pasar.	10 (20%)	34 (68%)	6 (12%)	50
2	Penempatan Pedagang.	12 (24%)	28 (60%)	10 (16%)	50
Jumlah		22	62	16	100
Rata-rata		11	31	8	50
Persentase		22%	62%	16%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Efektivitas dalam item penilaian Penataan Pasar dimana responden penelitian dalam kegiatan

Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjawab Baik sebanyak 10 responden atau 20% dengan alasan, Penataan Pasar sudah dilaksanakan dengan menempatkan bangunan Kios, dan Los. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 34 responden atau 68% dengan alasan, Penataan Pasar yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan penempatan bangunan kios dan los, akan tetapi penetapan tersebut belum tertata sesuai dengan alur kegiatan pasar seperti belum tersedia tempat khusus penjualan ikan, sayuran dan peralatan dapur melainkan terlihat tertata rapi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 6 responden atau 12% dengan alasan, pelaksanaan Penataan Pasar belum menunjukkan keberhasilan dimana belum tertatanya kios dan los sesuai dengan kebutuhan kegiatan aktifitas pasar.

Kemudian untuk item penilaian Penempatan Pedagang yang mana responden penelitian dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menyatakan baik berjumlah 12 responden atau 24% dengan alasan, Penempatan Pedagang melalui penempatan kios dan los yang telah disediakan . Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 28 responden atau 60% dengan alasan, Berdas Penempatan Pedagang sudah disediakan kios dan los akan tetapi belum sesuai dengan penempatannya melainkan masih bercampur pada penempatannya kios dan los. Selanjutnya

responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 10 responden atau 16% dengan alasan, Penempatan Kios dan Los belum tertata dengan baik bahwa bangunan kios masih bersamaan dengan bangunan los.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Efektivitas dalam dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dimana dikatakan dalam katagori cukup baik, katagori cukup baik dengan nilai responden 31 atau 62% dengan alasan, dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modren oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti belum melakukan penataan pasar mulai dari pembangunan kios, dan los sesuai dengan kegiatan aktivitas pasar seperti penempatan kios dan los melainkan belum ditempatkan satu tempat bangunan secara khusus kios dan los. Penempatan pedagan juga belum pada bagian tempat yang disediakan melainkan pedagan masih berjualan tidak pada tempatnya tentunya hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kegiatan pendataan petugas pasar di setiap hari kegiatan pasar. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden melalui item Penataan Pasar, Penempatan Pedagang, dan Pendataan Pedagang.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Irzal Kepala Bidang Perdagangan dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 10 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“... Pelaksanaan Revitalisasi pasar yang telah saya koordinir bersama bawahan saya kami sudah melaksanakan tugas kami dengan maksimal,

hal ini dapat diketahui dalam penetapan pembangunan pasar kios, los sesuai dengan kegiatan pemakaian pengguna pasar.....”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muktar Kepala seksi pasar dan retribusi pasar dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 10 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“... Sejauh ini Pelaksanaan Revitalisasi pasar dengan melakukan penetapan pembangunan pasar kios, los sesuai dengan kegiatan pemakaian pengguna pasar. Memang sejauh ini pembaguan yang kami buat belum seperti permintaan pedagang sehingga belum memberikan kepuasan terhadap para pedagan.....”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muni pengunjung Pasar modern Tanjung Harapan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 11 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini saya perhatikan penataan pasar belum sesuai dengan keinginan pengguna pasar sehingga para pedagang berjualan diluar bangunan pasar yang telah disediakan....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa pencapaian penataan pasar mulai dari pembangunan kios, dan los belum sesuai dengan kemajuan pasar sehingga pedagang masih berjualan tidak pada tempat yang telah disediakan hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya kegiatan pendataan dan pengawasan serta sanksi bagi pedagang yang melanggar ketentuan lokasi berjualan sehingga pedagang berjualan tidak pada lokasi yang ditetantukan. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden melalui item Penataan Pasar,

Penempatan Pedagang, dan Pendataan Pedagang. sehingga dapat diketahui pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam katagori cukup baik.

5.2.2. Efisiensi

Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada yang berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Efisiensi yang terlaksana yaitu :

1. Pelaksanaan Penertiban Pasar.
2. Penetapan kegiatan pengelolaan pasar.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan bidang pengelolaan pasar dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.5. Tanggapan Responden Berdasarkan Teori Dunn (2003;608) Dalam Indikator Efisiensi Dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pelaksanaan Penertiban Pasar.	15 (30%)	30 (60%)	5 (10%)	50
2	Penetapan kegiatan pengelolaan pasar.	10 (20%)	31 (62%)	9 (18%)	50
Jumlah		25	61	14	150
Rata-rata		12	31	7	50
Persentase		24%	62%	14%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator efisiensi dalam item penilaian Pelaksanaan Penertiban Pasar dimana responden penelitian dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjawab baik sebanyak 15 responden atau 30% dengan alasan, Pelaksanaan ketertiban pasar dengan penetapan kios, los pada tempat yang telah di tetapkan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 30 responden atau 60% dengan alasan, Pelaksanaan Penertiban Pasar sudah dilakukan namun belum adanya penetapan waktu penertiban sehingga masih ditemui kepemilikan kios/los yang berjualan tidak pada tempatnya. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 5 responden atau 10% dengan alasan, pelaksanaan Penertiban Pasar belum terlaksana dengan maksimal sehingga pengguna pasar kis dan los tidak berjualan pada tempatnya melainkan diluar gedung pasar.

Kemudian untuk item penilaian penetapan kegiatan pengelolaan pasar yang mana responden penelitian dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjawab baik sebanyak 15 responden atau 30% dengan alasan, telah dilakukan penetapan kegiatan pengelolaan pasar dengan penempatan bangunan Kios dan Los dan fasilitas pendukung kegiatan pasar seperti lokasih parkir dan penampunagn sampah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 30 responden atau 60% dengan alasan, pelaksanaan pengelolaan pasar sudah dilakukan namun belum mendukung

terhadap keberhasilan pasar seperti belum tertatanya pembangunan kios dan los pada tempat yang selayaknya dan lokasi parkir belum tersedia dan penampungan sampah yang masih belum memadai. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 5 responden atau 10% dengan alasan, penetapan kegiatan pengelolaan pasar belum memberikan keberhasilan kegiatan pasar seperti bangunan kios dan los belum disesuaikan penempatannya seperti khusus kios atau los melainkan di acak dan ketersediaan lokasi parkir yang belum memadai sehingga masih banyak kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai efisiensi dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dimana dikatakan dalam kategori cukup baik, kategori cukup baik dengan nilai responden 31 atau 62% dengan alasan, dalam Pelaksanaan penertiban pasar belum terlaksana dengan maksimal dimana diketahui bahwa pedagang belum berjualan pada tempat yang telah disediakan melainkandiluar gedung pasar hal ini dikarenakan pengelolaan pasar belum pada tempat sesuai dengan kegiatan perbelanjaan sehingga banyak para pedagang berjualan diluar gedung. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden melalui item Pelaksanaan Penertiban Pasar, Penetapan kegiatan pengelolaan pasar

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Irzal Kepala Bidang Perdagangan dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan

Meranti pada tanggal 10 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“... Kegiatan penertiban pasar sudah kami lakukan dengan penetapan para pedagang di tempat yang telah disediakan. Emang kami akui masih banyak pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya hal ini dikarenakan para pembeli cenderung berbelanja diluar gedung dikarenakan adanya pedagang kaki lima, namun kami selalu berusaha akan melakukan penertiban.....”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muktar Kepala seksi pasar dan retribusi pasar dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 10 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“... Penertiban yang kami lakukan dengan memberian himbauan agar para pedagang berjualan pada tempat yang disediakan namun masih banyak pedagang berjualan diluar gedung dengan alasan para pembeli terlalu jauh belanja kedalam sehingga para pedagang berjualan diluar gedung yang telah disediakan.....”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muni pengunjung Pasar modern Tanjung Harapan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 11 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini kegiatan pasar belum dapat ditertibkan oleh petugas pasar yang diluar gedung sehingga kami harus berjualan di luar gedung agar jualan kami laku sesuai dengan pedagang lainnya....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa Pelaksanaan penertiban pasar belum terlaksana dengan maksimal dimana diketahui bahwa pedagang belum berjualan pada tempat yang telah disediakan

melainkan diluar gedung pasar hal ini dikarenakan pembangunan pasar belum pada tempat sesuai dengan kegiatan perbelanjaan sehingga banyak para pedagang berjualan diluar gedung. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden melalui item Pelaksanaan Penertiban Pasar, Penetapan kegiatan pengelolaan pasar sehingga dapat diketahui pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam katagori cukup baik.

5.2.3. Kecukupan

Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Kecukupan yang terlaksana yaitu :

1. Kerjasama Petugas Pasar
2. Kerjasama dengan Pedangan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan bidang pengelolaan pasar dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.6. Tanggapan Responden Berdasarkan Teori Dunn (2003;608) Dalam Indikator Kecukupan Dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kerjasama Petugas Pasar.	14 (28%)	30 (60%)	6 (12%)	50
2	Kerjasama dengan Pedangan	12 (24%)	30 (60%)	8 (16%)	50
Jumlah		26	60	14	150
Rata-rata		13	30	7	50
Persentase		26%	60%	14%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Kecukupan dalam item penilaian Pelaksanaan Penertiban Pasar dimana responden penelitian dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjawab baik sebanyak 14 responden atau 28% dengan alasan, Kerjasama Petugas Pasar dalam hal penangan pasar, pengawasan dan pemberian pelayanan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 30 responden atau 60% dengan alasan, kerjasama petugas pasar sudah terjalin namun belum adanya upaya dalam penanganan pasar dengan baik terhadap keluhan dan pengawasan kegiatan pasar sehingga rutinitas pasar tidak berlangsung dengan baik terkait penempatan para pedagang. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 6 responden atau 12% dengan alasan, kerjasama dalam penanganan pasar oleh petugas pasar belum maksimal dimana banyak yang menjadi keluhan para pedagang terutama penempatan berjualan hal ini

dikarenakan penempatan kegiatan berjualan yang disediakan tidak sesuai dengan kegiatan rutinitas pasar dimana belum tertata dengan baik.

Kemudian untuk item penilaian Kerjasama dengan Pedangan yang mana responden penelitian dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjawab baik berjumlah 12 responden atau 24% dengan alasan, Kerjasama dengan Pedangan sudah dilakukan terkait pelayanan yang diberikan bagi keluhan dan masukan para pedagang. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 30 responden atau 60% dengan alasan, Kerjasama petugas pasar terhadap pedagang sudah dilakukan namun apa yang menjadi keluhan pedagang masih tidak dihiraukan sehingga pedagang terlihat kurang mengikuti aturan kegiatan pasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 8 responden atau 16% dengan alasan, Belum terjalinnya kerjasama pedagan dengan petugas pasar dengan baik dimana keluhan pedagang belum didengar petugas pasar dan dilakukan perbaikan akan keluhan pedagang terutama penataan kegiatan pasar hal ini dikarenakan banyak pedagang kaki lima yang berjualan diluar gedung pasar sehingga pengguna gedung pasar kewalahan dalam berjualan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai efisiensi dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dimana dikatakan dalam katagori cukup baik, katagori cukup baik dengan nilai responden 30 atau 60% dengan alasan,

kerjasama yang terjalin antara petugas pasar dan dengan pengguna pasar diketahui belum berlangsung dengan baik dimana petugas pasar belum melakukan perbaikan akan himbauan pengguna pasar terutama penataan para pedagang dimana pedagang kaki lima masih berjualan diluar gedung pasar sehingga pengguna gedung pasar minimnya para pembeli sehingga banyak para pedagang yang berjualan diluar gedung pasar hal ini dikarenakan himbauan pedagang tidak dihiraukan oleh petugas pasar. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden melalui item Kerjasama Petugas Pasar, Kerjasama dengan Pedagang.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Irzal Kepala Bidang Perdagangan dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 10 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“... Sejauh ini kami sudah melakukan bekerjasama baik sesama petugas dan para pedagang dengan tujuan berlangsungnya kegiatan pasar dengan baik, namun kami sejauh ini masih mengalami kesulitan terutama dalam menata pedagang kaki lima yang berjualan diluar gedung, sehingga para pedagang didalam gedung komplin untuk menindaknya. Namun kami selalu tetap berusaha untuk saling bekerjasama dalam kegiatan pasar....”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muktar Kepala seksi pasar dan retribusi pasar dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 10 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“... Kami dalam penataan dan pengembangan pasar sudah bekerjasama antar petugas dan pedagang. Namum kerjasama yang terjalin belum maksimal terutama terhadap pedagang terutama himbauan dalam penangan pedagang kaki lima diluar gedung. Namum kami selalu berusaha dalam menjalin kerjasama dalam pengembangan pasar.....”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muni pengunjung Pasar modern Tanjung Harapan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 11 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini petugas pasar belum melakukan kerjasama dengan para pedagang dimana keluhan kami belum adanya jawaban dari petugas terutama terkait penertiban pedagang diluar gedung sehingga jualan kami kurang laku yang berada didalam gedung....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa kerjasama yang terjalin antara petugas pasar dan pengguna pasar diketahui belum berlangsung dengan baik dimana petugas pasar belum melakukan upaya penanganan atas himbuan pedagang didalam gedung pasar dalam penanganan pedagang liar di luar gedung pasar terutama para pedagang kaki lima masih berjualan diluar gedung pasar sehingga pengguna gedung pasar minimnya para pembeli. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden melalui item Kerjasama Petugas Pasar, Kerjasama dengan Pedagang, sehingga dapat diketahui pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam katagori cukup baik.

5.2.4. Perataan

Perataan adalah pemberian pencapaian hasil yang maksimal dalam kebijakan yang tercipta terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluruh berdasarkan tugas dan fungsinya. Untuk itu penulis mencoba

menganalisa bagaimana Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Kecukupan yang terlaksana yaitu :

1. Memberikan pelayanan terhadap pengguna pasar.
2. Pemberian pembinaan pengguna kios, los.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan bidang pengelolaan pasar dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.7. Tanggapan Responden Berdasarkan Teori Dunn (2003;608) Dalam Indikator Perataan Dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberikan pelayanan terhadap pengguna pasar.	10 (20%)	34 (68%)	6 (12%)	50
2	Pemberian pembinaan pengguna kios, los.	12 (24%)	30 (60%)	8 (16%)	50
Jumlah		22	64	14	150
Rata-rata		11	32	7	50
Persentase		22%	64%	14%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Kecukupan dalam item penilaian Memberikan pelayanan terhadap pengguna pasar dimana responden penelitian dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjawab baik sebanyak 10 responden atau 20% dengan alasan, penataan pasar dengan menyediakan bangunan Los dan Kios sesuai

dengan penempatan para pedagang. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 34 responden atau 68% dengan alasan, Penetapan Los, Kios. Pelayanan yang diberikan petugas pasar sudah tepat sasaran meskipun masih ada kendala-kendala yang masih lamanya tindakan yang akan diselesaikan yaitu dalam penempatan parker motor yang cenderung menjadi kendala para masyarakat yang sedang berbelanja dan respon pedagang dalam hal kebersihan masih cenderung lalai dan belum dirasakan pelayanan petugas pasar terlaksana secara baik. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 6 responden atau 12% dengan alasan, pelayanan bidang pengelolaan pasar terhadap para pedagang masih mengalami banyak kendala. Hal ini pelayanan yang diberikan hanya sekedarnya saja apabila terjadi permasalahan yang dialami para pengguna pasar.

Kemudian untuk item penilaian Pemberian pembinaan pengguna kios, los yang mana responden penelitian dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjawab baik berjumlah 12 responden atau 24% dengan alasan, Pemberian pembinaan pengguna kios, los terkait aturan dan kegiatan pengguna pasar. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 30 responden atau 60% dengan alasan, Pemberian pembinaan pengguna kios, los sudah dilakukan namun belum dilakukan pembinaan secara merata terhadap pengguna pasar los, kios sehingga masih banyak pengguna pasar belum tau akan aturan dalam pengguna pasar. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 8 responden atau 16% dengan alasan,

penetapan pembinaan terhadap kepemilikan los, kios belum berlangsung dilakukan secara merata sehingga engguna kis, dan los masih banyak yang belum mengetahui peraturan dalam pengguna pasar dimana masih terlihat pengguna pasar kios dan los yang berjualan tidak pada tempat yang telah disediakan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai indikator efisiensi dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dimana dikatakan dalam katagori cukup baik, katagori cukup baik dengan nilai responden 32 atau 64% dengan alasan, kegiatan revitalisasi pasar modern melalui pemeberian pelayanan terhadap pengguna pasar belum maksimal dimana diketahui keluhan pengguna pasar belum dihiraukan petugas pasar hal ini terkait penyediaan penampungan sampah aliran air pembuangan dan jalan pasar yang berlubang, begitujuga kegiatan pembinaan yang diberikan terhadap kepemilikan los, kios belum dilakukan secara merata sehingga masih banyak kepemilikan kios, dan los yang belum mengetahui aturan pengguna pasar sehingga sebagian pengguna kios, dan los masih berjualan diluar gedungan pasar. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden melalui item Memberikan pelayanan terhadap pengguna pasar, Pemberian peminan pengguna kios, los.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Irzal Kepala Bidang Perdagangan dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 10 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“... Sejauh ini saya sebagai pimpinan sudah memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap pengguna kios, dan los bersama dengan petugas

pasar dilapangan, namun kami akui belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan pengguna kios, dan los kebanyakan tidak acuh terhadap kegiatan pasar sementara kami meyediakan pelayanan apa yang menjadi keluhan pengguna kios, dan los. Begitu juga terkait pembinaan belum semua pengguna kis, los mengikuti kegiatan pembinaan yang diberikan....”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muktar Kepala seksi pasar dan retribusi pasar dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 10 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“... Sejauh ini kami sebagai petugas pasar sudah memberikan pelayanan terhadap pengguna kios, los terkait keluhan dan himbauan dan kami sudah melakukan pembinaan terhadap pemilik kios dan los terkait aturan dan kegiatan pasar yang berlangsung, namun belum semua pengguna pasar respon terkait kegiatan pembinaan sehingga tidak mengetahui akan aturan yang dipatuhi dalamkegaitan rutinitas pasar....”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muni pengunjung Pasar modern Tanjung Harapan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 11 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini petugas pasar belum memberikan pembinaan terhadap pengguna pasar terkait aturan dan pelayanan pasar sehingga pengguna pasar acuh tak achy terkait larangan yang ditetapkan....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa pelayanan yang dilakukan petugas pasar terhadap pengguna pasar belum maksimal dimana diketahui keluhan pengguna pasar belum dihirauan petugas pasar hal ini terkait penyediaan penampungan sampah aliran air pembuangan dan jalan pasar yang berlubang, serta pembinaan yang belum dilakukan terhadap

kepemilikan los, kios secara merata mengenai aturan pengguna pasar sehingga sebagian besar pengguna kios, dan los berjualan diluar gedung pasar. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden melalui item Memberikan pelayanan terhadap pengguna pasar, Pemberian pembinaan pengguna kios, los, sehingga dapat diketahui pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam katagori cukup baik.

5.2.5. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan yang akan dicapai. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Kecukupan yang terlaksana yaitu :

1. Penetapan kebersihan pasar.
2. Penyediaan sarana prasaranan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan bidang pengelolaan pasar dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.8. Tanggapan Responden Berdasarkan Teori Dunn (2003;608) Dalam Indikator Responsivitas Dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Penetapan kebersihan pasar.	12 (24%)	32 (64%)	6 (12%)	50
2	Penyediaan fasilitas pasar.	15 (30%)	30 (60%)	5 (10%)	50
Jumlah		27	62	11	150
Rata-rata		13	31	6	50
Persentase		26%	62%	12%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Responsivitas dalam item penilaian Penetapan kebersihan pasar dimana responden penelitian dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjawab baik berjumlah 12 responden atau 24% dengan alasan, Penetapan kebersihan pasar dengan melakukan pengangkutan sampah dan penyediaan tempat pembuangan sampah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 32 responden atau 64% dengan alasan, Penetapan kebersihan pasar diaman petugas belum menyediakan secara menyeluruh tempat penampungan sampah dan kegiatan pengangkutan sampah disetiap harinya. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 6 responden atau 12% dengan alasan, petugas pasar belum melakukan kegiatan pengangkutan sampah disetiap harinya dan menyediakan tempat penampungan sampah di ruas jaan pasar.

Kemudian untuk item penilaian Penyediaan fasilitas pasar yang mana responden penelitian dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjawab baik sebanyak 15 responden atau 30% dengan alasan, Penyediaan fasilitas pasar sudah disediakan seperti tong sampah, lampu dalam gedung pasar, dan lokasi parkir. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 30 responden atau 60% dengan alasan, ketersediaan fasilitas pasar sudah tersedia namun belum memadai terhadap pendukung kegiatan pasar seperti tong sampah yang belum tersedia di setiap sudut pasar sehingga sampah bertumpuk dan berserakan, dan penyediaan lokasi parkir yang belum memadai sehingga terlihat kendaraan parkir masih berserakan tidak pada tempatnya. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 5 responden atau 10% dengan alasan, belum maksimalnya penyediaan fasilitas pendukung kegiatan pasar seperti masih belum tersedianya tempat penampungan sampah yang memadai dan lokasi parkir yang memadai terhadap kendaraan parkir.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai indikator efisiensi dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dimana dikatakan dalam katagori cukup baik, katagori cukup baik dengan nilai responden 31 atau 62% dengan alasan, pelaksanaan kegiatan kebersihan pasar belum berlangsung dengan maksimal dimana diketahui masih banyak sampah yang berserakan disekitar pasar hal ini

dikarenakan kurangnya ketersediaan tong penampung sampah disetiap sudut pasar dan belum dilakukannya pengangkutan kebersihan sampah disetiap harinya, begitu juga penyediaan fasilitas pasar belum memadai terhadap pendukung kegiatan pasar seperti penyediaan tepat penampungan sampah dan lokasi parkir yang belum memadai sehingga banyak kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden melalui item Penetapan kebersihan pasar, Penyediaan fasilitas pasar.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Irzal Kepala Bidang Perdagangan dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 10 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“...Kami sudah melakukan kegiatan kebersihan sampah yang ada di pasar, dan menyediakan fasilitas pendukung kegiatan pasar seperti lokasi parkir, lampu didalamgedung pasar, dan penyediaan penampungan sampah. Meskipun hal ini belum terselenggara dengan maksimal terutama pada penampungan sampah dan kebersihan sampah hal ini dikarenakan kurangnya petugas sampah yang ada dalam kegiatan kebersihan sampah yang ada di pasar.....”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muktar Kepala seksi pasar dan retribusi pasar dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 10 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“... Kami sudah melakukan kebersihan sampah dan penyediaan fasilitas pendukung kegiatan pasar, memang sejauh ini masih menjadi keluhan pengguna pasar terkait sampah yang berserakan hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas pasar dalam kegiatan kebersihan pasar, dan kami tetap berusaha dalam meningkatkan kegiatan pendukung pasar.....”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muni pengunjung Pasar modern Tanjung Harapan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 11 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini petugas pasar belum melakukan kegiatan kebersihan disetiap harinya sehingga sampah masih berserakan dan penyediaan tempat sampah masih kurang tersedia.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti diketahui pelaksanaan kegiatan kebersihan pasar belum berlangsung dengan maksimal dimana masih banyak sampah yang berserakan disekitar pasar dikarenakan penyediaan fasilitas pasar belum memadai seperti penyediaan tempat penampungan sampah dan lokasi parkir yang belum memadai sehingga mengakibatkan banyak kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden melalui item Penetapan kebersihan pasar, Penyediaan fasilitas pasar, sehingga dapat diketahui pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam katagori cukup baik.

5.2.6. Ketepatan

Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan pencapaian tugas pelaksanaan yang ditetapkan. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Kecukupan yang terlaksana yaitu :

1. Melakukan pengawasan kegiatan pasar.
2. Pemberian Sanksi.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.9. Tanggapan Responden Berdasarkan Teori Dunn (2003;608) Dalam Indikator Ketepatan Dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melakukan pengawasan kegiatan pasar.	14 (28%)	31 (62%)	5 (10%)	50
2	Pemberian Sanksi.	12 (24%)	30 (60%)	8 (16%)	50
Jumlah		26	61	13	100
Rata-rata		13	31	6	50
Persentase		26%	62%	12%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Ketepatan dalam item penilaian melakukan pengawasan kegiatan pasar dimana responden penelitian dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjawab baik berjumlah 14 responden atau 28% dengan alasan, Kegiatan pengawasan pasar suda dilakukan dengan petugas pasar melakukan pegawasan di setiap kegiatan pasar. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 31 responden atau 62% dengan alasan, pegawasan petugas

pasar terhadap kegiatan pasar sudah terlaksana namun petugas pasar hanya ditemui di pos pasar namun tidak adanya kegiatan patroli sehingga terciptanya ketertiban pasar terhadap pengguna pasar. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 5 responden atau 10% dengan alasan, diketahui petugas pasar belum melakukan pengawasan secara langsung dalam kegiatan pasar yang sudah berlangsung namun hanya di pos pasar sehingga masih banyak ditemui para pedagang yang berjualan tidak pada tempat yang disediakan.

Kemudian untuk item penilaian Pemberian Sanksi yang mana responden penelitian dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjawab baik sebanyak 12 responden atau 24% dengan alasan, Pemberian Sanksi yang diterapkan dalam kegiatan pasar berupa tegoran, penutupan dan denda. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 30 responden atau 60% dengan alasan, pemberian sanksi oleh petugas terhadap penyalugunaan aturan pasar belum diterapkan dengan maksimal melainkan hanya himbauan saja sehingga masih banyak ditemui pengguna pasar tidak berjualan pada gedung yang telah disediakan melainkan diluar gedung yang disediakan. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 8 responden atau 16% dengan alasan, penetapan sanksi terhadap penyalugunaan pasar belum diterapkan dengan maksimal sehingga masih banyak pengguna pasar berjualan tidak pada tempat yang telah disediakan melainkan di luar Gedung pasar.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai indikator efisiensi dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dimana dikatakan dalam kategori cukup baik, kategori cukup baik dengan nilai responden 31 atau 62% dengan alasan, Pengawasan petugas pasar terhadap keberlangsungan pasar belum terlaksana dengan maksimal dimana petugas pasar belum melakukan pengawasan secara langsung dalam kegiatan pasar meainkan hanya di pos pasar saja sehingga terdapat banyak pengguna pasar tidak berjualan pada tempat yang telah disediakan dan belum diterapkannya sanksi tegas terhadap penyalngunaan pasar ysesuai dengan aturan yang ada sehingga terlihat masih banyak pengguna pasar tidak berjualan pada gedung pasar yang telah disediakan melainkan diluar gedung pasar. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden melalui item Melakukan Pengawasan kegiatan pasar, Pemberian Sanksi.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Irzal Kepala Bidang Perdagangan dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 10 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“... Sejauh ini dalam peningkatan keberhasilan pasar kami melakukan pengawasan kegiatan pasar dan menerapkan sanksi terhadap pengguna pasar yang melanggar aturan yang ditetapkan seperti kegiatan berjualan di luar gedung pasar yang telah disediakan, meskipun masih ada ditemui diluar gedung berjualan namun mereka berjualan dengan gerobak sendiri dan hanya pagi saja. Dan kami selalu berusaha melakukan penertiban dan pemberian sanksi bagi yang melanggar aturan kegiatan pasar....”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muktar Kepala seksi pasar dan retribusi pasar dalam kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 10 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“... dalam kegiatan pasar kami sudah melakukan pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pengguna pasar yang melanggar aturan. Emang masih banyak pengguna pasar yang berjualan diluar gedung di pagi harinya. Namum kami selalu berusaha untuk menertibkannya dan berusaha memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan mulai dari pemberian himbauan, denda, dan penutupan.....”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muni pengunjung Pasar modern Tanjung Harapan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 11 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini petugas pasar belum menetapkan aturan secara tegas dalam kegiatan pasar sehingga para pedagang yang menyalahgunakan aturan seperti berdagang tidak pada lokasi yang telah disediakan dan belum adanya snksi tegas yang dilakukan petugas pasar.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti diketahui Pengawasan petugas pasar terhadap keberlangsungan pasar belum terlaksana dengan maksimal dimana petugas pasar belum melakukan pengawasan secara langsung dalam kegiatan pasar melainkan hanya di pos pasar saja sehingga terdapat banyak pengguna pasar tidak berjualan pada tempat yang telah disediakan dan belum diterapkannya sanksi tegas terhadap pengguna pasar sesuai dengan aturan yang ada sehingga terlihat masih banyak pengguna pasar tidak berjualan pada gedung pasar yang telah disediakan melainkan diluar gedung

pasar. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden melalui item Melakukan. Pengawasan kegiatan pasar, Pemberian Sanksi, sehingga dapat diketahui pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam katagori cukup baik.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.10. Rekapitulasi Jawaban Tanggapan Responden Berdasarkan Teori Dunn (2003;608) Dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektivitas	11 (22%)	31 (62%)	8 (16%)	50
2	Efisiensi	12 (24%)	31 (62%)	7 (14%)	50
3	Kecukupan	13 (26%)	30 (60%)	7 (14%)	50
4	Perataan	11 (22%)	32 (64%)	7 (14%)	50
5	Responsivitas	13 (26%)	31 (62%)	6 (12%)	50
6	Ketepatan	13 (26%)	31 (62%)	6 (12%)	50
Jumlah		73	186	41	300
Rata-rata		12	31	7	50
Persentase		24%	62%	14%	100%

Sumber : Olahan Data penelitian, 2020

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern untuk Efektivitas yang menjawab baik 11 atau 22%, Selanjutnya untuk jawaban cukup baik 30 atau 60%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 8 atau 16%.

Untuk indikator kedua yaitu Efisiensi dalam pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern yang menjawab baik 12 responden atau 24%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 31 responden atau 62%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 7 responden atau 14%.

Untuk indikator ketiga Kecukupan dalam pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern yang menjawab baik 13 responden atau 26%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 30 responden atau 60%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 7 responden atau 14%.

Untuk indikator keempat Perataan dalam pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern yang menjawab baik 11 responden atau 22%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 30 responden atau 60%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 7 responden atau 14%.

Untuk indikator kelima Responsivitas dalam pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern yang menjawab baik 13 responden atau 26%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 31 responden atau 62%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 6 responden atau 12%.

Untuk indikator keenam Ketepatan dalam pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern yang menjawab baik 13 responden atau 26%,

selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 31 responden atau 62%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 6 responden atau 12%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden Masyarakat yang menjawab baik dengan rata-rata 12 orang atau persentase 24%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik dengan rata-rata 31 orang atau persentase 62%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik 7 orang atau 14%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan melakukan penataan bangunan kios dan los, penempatan lokasi para pedagang, melakukan pengawasan dan pemberian sanksi, dan penyediaan fasilitas pendukung kegiatan pasar hal ini bertujuan terciptanya kenyamanan bagi para pedagang dan pengunjung pasar namun terlihat belum terlaksana dengan maksimal dimana masih ditemui pedagang berjualan tidak pada tepatnya yang telah disediakan, belum tersedianya fasilitas pendukung pasar seperti penyediaan tong sampah, pengakutan kebersihan sampah di lingkungan pasar, begitu juga terlihat kurangnya petugas pasar dalam melakukan kegiatan pengawasan pasar sehingga masih banyak pengguna pasar yang melanggar aturan dan belum diterapkannya sanksi tegas bagi pengguna pasar yang tidak berjualan pada gedung pasar yang telah disediakan, sehingga dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren dapat dikatakan cukup baik, hal ini didapatkan dari keseluruhan jawaban responden yang menjawab dengan rata-rata 31 atau persentase 62%, dengan

melihat pengukuran yang telah penulis tentukan sebelumnya yaitu dalam rentang antara 34%-65%.

5.3. Hambatan Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti), meliputi :

1. Kurangnya kemampuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penataan pasar sesuai dengan penempatan para pedagang.
2. Kurangnya jumlah pegawai secara khusus petugas pasar dalam pengelolaan pasar mulai dari penataan, pengawasan, dan pemberian pelayanan terhadap pengguna Pasar.
3. Kurangnya kerjasama petugas pasar dengan para pengguna pasar terkait pengembangan pasar.
4. Belum adanya ketetapan waktu kegiatan pengawasan oleh petugas pasar.
5. Belum adanya penerapan sanksi tegas bagi para pedangan terutama bagi pedagang yang tidak berjualan pada tempat yang telah disediakan.
6. Petugas pasar belum tanggap dalam penanganan dan penyediaan fasilitas pasar seperti penyediaan tempat penampungan sampah di setiap sudut gedung pasar, penyediaan lokasi parkir yang memadai dan parit pasar yang sering sumbat akibat sampah yang berserakan.

7. Belum adanya evaluasi yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti terkait pengembangan pasar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

P E N U T U P

1.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisa penelitian diketahui bahwa Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti) dilihat dari indikator Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan dapat dikategorikan cukup baik hal ini diketahui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan pengembangan pasar mulai dari penataan bangunan kios, los bagi para pedagang, penyediaan fasilitas pasar, melakukan pengawasan kegiatan pasar dan pelayanan bagi keluhan masyarakat pengguna pasar namun hal ini belum maksimal dilaksanakan terutama dalam pengawasan kegiatan pasar sehingga masih banyak para pedagang yang tidak menempati lokasi jualan yang telah disediakan dan pedagang kaki lima yang masih ditemui dilokasi pasar sehingga mengganggu kegiatan aktivitas pasar serta masih kurangnya penyediaan fasilitas tempat penampungan sampah, penyediaan lokasi parkir, hingga pemberian sanksi terhadap penyalagunaan ketetapan lokasi penempatan pasar.

2. Sementara hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren meliputi:
 - a. Diketahui kurangnya jumlah petugas pasar yang seharusnya petugas pasar dapat ditemui dalam melaksanakan tugasnya ditempat setiap harinya.
 - b. Kemampuan teknis petugas pasar yang dinilai masi lambat dalam menagani hambatan-hambatan yang terjadi dipasar seperti perbaikan jalan pasar, melengkapi penyediaan fasilitas pasar dan pentaan para pedagang.
 - c. Diketahui belum adanya kegiatan rutin dalam penetapan kegiatan pengawasan keberlangsungan kegiatan pasar.
 - d. Petugas pasar belum bekerjasama dengan para pedagang dalam pengembangan pasar.
 - e. Belum adanya kegiatan evaluasi terhadap pencapaian pengembangan pasar.

6.2. Saran

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti perlunya penambahan jumlah petugas secara khusus dalam penaganan pasar.
2. Bagi petugas pasar sebaiknya dilakukan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan didalam pengembangan pasar.
3. Petugas pasar lebih maksimal dalam melakukan pengawasan secara rutin dalam keberlangsungan pasar.
4. Perlunya kerjasama petugas pasar dengan kepemilikan los/kios dalam membenahan pengembangan pasar.

5. Petugas pasar selayaknya memberikan sanksi tegas bagi pengguna pasar yang tidak memiliki lokasi pasar yang telah ditetapkan.
6. Sebaiknya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan evaluasi terkait pengembangan dan pengelolaan pasar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru:Alaf Riau.
- Abdurrahmat, Fathoni. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung : Rineka Cipta.
- Ali, Faried. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi dari pemikiran paradigmatis menuju redefinisi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Alamsyah, D. 2011. *Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- George. R. Terry. 2012. *Asas-asas Manajemen*. Cetakan tujuh. Bandung: PT. Alumni.
- Hamim, Sufian, 2005, *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press.
- Hasibuan, Malayu, SP. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Hadari Nawawi 2005. *Manajemen Strategi*, Gadjah Mada Pers : Yogyakarta.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Indrastuti, Sri 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Pekanbaru, UR Press.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sistem Pemerintah Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kasim, Azhar. *Perkembangan Ilmu Administrasi Publik, Manajemen Pembangunan*, No. 3/I, pril 1993

- Koryati, Nyimas Dwi, dkk, 2005. *Kebijakan Dan Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta, YPAPI.
- Mustopadidjaja AR. 2003. *SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Gunung Agung.
- Ndrah, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi I dan II*. Jakarta. Rineka Cipta.Pembagunan.
- Nurcholis, Hanif,2005 *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*.PT. Gramedia, Jakarta.
- Salusu, J. 2003. *Pengambilan keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Rasindo.
- Sedarmayanti.2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Simamora, Henry, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi ketiga, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- Siagian, S.P. 2004. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Citra Bakti Aditia Media.
- _____. 2004. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2006. *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Raja Grafindo. dan *Implementasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Supriyono. 1985. *Manajemen Strategi dan Kebijaksanaan Bisnis*. BPFE : Yogyakarta.
- Syafi'I Inu Kencana. 2003. *Sistem administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Purohim Roup. 2012. *Manajemen Stratejik*. Bogor, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan.
- Tangkilisan, Hesel Nogi 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Lukman Offset.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama.

Winardi, 2010, *Asas-asas Manajemen*. Gramedia; Bandung.

Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zulkifli. 2005, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, UIR PRESS. Pekanbaru

B. Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021.

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.